KPK Dorong Pemkab Pasuruan Tingkatkan Nilai MCP Demi Hindari Korupsi

Selasa, 21 November 2023

KPK mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) guna mencegah korupsi. MCP menjadi bentuk pengendalian internal penting untuk pemberantasan korupsi di daerah, yang diukur melalui delapan area program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi. Delapan area tersebut, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Irawati, Ketua Satgas Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK, menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan program-program tersebut, celah korupsi dapat ditutup. Penguatan sistem dan tata kelola yang menjunjung tinggi budaya antikorupsi juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan nilai MCP.

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menyambut baik dorongan KPK, dan menyatakan bahwa Pemkab Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan nilai MCP yang saat ini masih di angka 60. Inspektorat Pemkab Pasuruan juga terus melakukan monitoring dan supervisi untuk menilai dan mengukur sejauh mana tata kelola pemerintahan diintegrasikan pada program pencegahan korupsi.

Andriyanto meyakinkan seluruh ASN untuk mengimplementasikan sistem yang ada di dalam tata kelola pemerintah agar terhindar dari potensi korupsi. Penting bagi setiap OPD untuk memahami definisi tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, serta menerapkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi yang dilakukan KPK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen Pemkab Pasuruan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat meminimalisir potensi korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.